

CATATAN ETNOGRAFI 8 (SINTESA)

Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda
Kalimantan Timur

WAJAH KRISIS PEREMPUAN SEMPAJA

Ika



“Wajah krisis yang tergambar di Kelurahan Sempaja Utara adalah dampak dari rezim ekstraksi yang memposisikan manusia sebagai aspek yang diabaikan dari segi keselamatan dan kenyamanan. Selain manusia, alam adalah objek vital yang dalam praktek-praktek pertambangan menjadi sumber daya yang dieksploitasi tanpa ampun”. -SNS

Abstraksi

Pertengahan Februari hingga Desember 2016 adalah suatu rentetan proses belajar di salah satu wilayah di Kalimantan Timur yang potret krisis sosial ekologisnya terlihat begitu vulgar akibat rezim ekstraksi tambang batu bara mengepung wilayah ini. Lokasi tersebut terletak di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Samarinda adalah Ibukota provinsi Kalimantan Timur yang 71 % wilayahnya telah dikaveling-kaveling untuk lahan pertambangan batu bara. Apalagi, sejak keluarnya UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak 2000-2010 pada masa kepemimpinan AAS sebagai Walikota Samarinda selama dua periode, ada 63 IUP terbit, ± 8 di antaranya berada di Sempaja Utara. Salah satu penanda krisis yang paling lekat di Sempaja Utara adalah hilangnya sumber air bersih dari sumur-sumur warga, itu bersamaan sejak perusahaan tambang mulai beroperasi dan membuat lubang. Lubang tambang tersebut mengandung beberapa senyawa berbahaya, sementara masyarakat banyak yang menggunakan air bekas lubang tambang untuk kebutuhan mandi dan mencuci karena sumber air mereka mulai (di)hilang(kan). Di Kalimantan Timur, sudah 24 korban tenggelam di lubang bekas tambang dan kasus penanganannya kebanyakan mandek di ranah hukum.

Pendahuluan

Pertama kali menginjakkan kaki di Kalimantan Timur, saya mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang, kota Balikpapan. Kota tujuan saya adalah Samarinda, yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Saya harus melanjutkan perjalanan menggunakan *travel* bandara untuk sampai ke Samarinda. Perjalanannya menghabiskan waktu sekitar 3 jam, melewati jalan berbelok-belok dan naik turun. Perjalanan itu sempat membuat saya mabuk darat dan merasa pusing. Namun saya memilih tidak tidur, karena tak ingin melewatkan kesempatan menikmati perjalanan menuju kota yang selama ini membuat saya penasaran. Kota yang dari awal, saya hanya disuguhi cerita tentang kondisi wilayah yang katanya menjadi korban tambang batu bara. Kawasan yang sedang mengalami kebangkrutan ekologis karena industri keruk batu bara mengepung wilayah ini dengan keluarnya banyak izin tambang.

Dalam perjalanan, banyak sekali mobil tangki dan kendaraan pengangkut bermuatan besar seperti truk, dan mobil jenis lainnya. Berlawanan arah, berpapasan dengan mobil yang saya tumpangi yang masing-masing melaju terburu-buru. Muatan yang diangkut tidak nampak karena ditutup menggunakan terpal. Dari dalam mobil, saya melihat truk yang tergeletak di pinggir jalan, karena kecelakaan. Mobil tersebut menabrak pohon besar yang berada di depan rumah warga. Entahlah, berapa korban jiwa dalam kecelakaan itu.

Landscape bentangan alam sepanjang jalan menuju Samarinda menunjukkan beberapa areal perkebunan kelapa sawit yang terhampar, berdampingan dengan kebun sayur, buah, dan pohon berbatang kecil nan tinggi (saya sendiri tidak tau nama pohonnya). Beberapa pohon yang tumbuh di sekitar sawit, tampak seperti kerangka yang terlihat kering tanpa daun. Saya jadi teringat materi yang sempat dibawakan oleh HSO saat loka latih di Bogor bulan Januari lalu, yang mengatakan "Sawit itu rakus air". Selain itu, seorang ahli lahan gambut dari UGM,

mengatakan bahwa untuk menghasilkan 1 Kg buah sawit, dibutuhkan air sebanyak 400 liter (Tempo, 17 November 2015).

Di dalam mobil saya banyak mengobrol dengan salah satu penumpang, yang kebetulan satu pesawat dari Makassar. Namanya LN, perempuan berdarah Makassar yang tinggal di Tenggarong mengikuti suaminya yang bekerja di salah satu perusahaan perkapalan. Ketika hendak sampai di Kota Samarinda dan melewati jembatan, dia yang pertama kali mengenalkan nama Sungai Mahakam.

Melintasi jembatan Mahakam yang lumayan panjang, saya sempat melihat kapal ponton pengangkut batu bara melintasi jalur sungai Mahakam. Hari itu, menjelang Magrib disahuti dengan suara azan Islamic Centre yang berada di tepian sungai. Islamic Centre adalah salah satu ikon Samarinda. Lampu-lampu mulai terpancar, satu persatu meramaikan pemandangan kota. Gemerlap pantulan lampu terlihat di bawah air sungai seperti cermin. Sepanjang jalan tepian Mahakam, telah ramai dipasang lapak orang-orang yang akan berjualan.

Sungai Mahakam adalah salah satu identitas Kalimantan Timur, sekaligus penanda sejarah. Sungai ini dahulunya digunakan sebagai jalur perdagangan dan lalu lintas utama transportasi air saat Kesultanan Kutai masih berjaya. Sungai Mahakam selain menjadi sungai terpanjang di Kalimantan Timur, juga merupakan salah satu penanda penting dalam perkembangan ekonomi pada zaman kolonial hingga pergantian rezim kekuasaan sampai sekarang setelah Indonesia merdeka, terutama di Samarinda.

Namun kini, setelah dikepung industri ekstraktif batu bara, Samarinda mengalami kebangkrutan ekologis. Bencana banjir, penyakit ispa, berubahnya ruang hidup masyarakat, kehilangan air bersih, nyawa berjatuh di lubang tambang dan berubahnya mata pencaharian masyarakat adalah penanda krisis sosial ekologis sebagai bayaran mahal yang harus ditanggung masyarakat. Kerugian itu sama sekali tidak pernah menjadi PR bagi pemerintah, untuk diselesaikan. Sementara, keuntungan dibalik kerusakan itu, hanya dinikmati oleh segelintir orang karena banyaknya penyimpangan terjadi yang tidak terlepas dari kegiatan pertambangan. Mulai dari indikasi korupsi, pelanggaran hukum dan HAM.

Dalam makalah ini, topik utama yang akan saya bahas adalah dinamika sosial, politik-ekonomi, dan krisis sosial ekologis yang terdapat di salah satu kelurahan di Samarinda yaitu Sempaja Utara, yang menjadi korban dari daya rusak tambang batu bara. Samarinda adalah kawasan yang 71 % telah dikaveling untuk kepentingan tambang batu bara. Melalui mekanisme peraturan daerah, maka jalur pemberian izin masif dilakukan oleh pemerintah. Samarinda merupakan potret sirkuit akumulasi kapital yang menjadikan alam sebagai prasyarat untuk menciptakan rantai produksi. Sehingga terjadi perubahan bentangan alam sangat kentara menuju kebangkrutan. Hal tersebut ditandai dengan hilangnya sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat. Kedua, saya mengangkat topik tentang krisis yang dialami perempuan, dan perubahan ruang hidup sebelum, sedang dan setelah tambang masuk.

Gambaran Umum Kota Samarinda

Samarinda adalah salah satu daerah yang dulunya masuk dalam kekuasaan Kesultanan Kutai. Namun, pada masa kemerdekaan 1945, terjadi pergolakan politik dimana sistem pemerintahan di Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura bergabung menjadi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 1947, Kesultanan Kutai Kartanegara dimasukkan ke dalam Federasi Kalimantan Timur, kemudian dua tahun kemudian bergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Hingga pada 1953 Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai dengan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 menjadi daerah otonomi tingkat Kabupaten. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan, wilayah Daerah Istimewa Kutai dimekarkan menjadi 3 Daerah Tingkat II, yaitu; Daerah Tingkat II Kutai dengan Ibukota Tenggarong, Kotapraja Balikpapan dengan Ibukota Balikpapan, dan Kotapraja Samarinda dengan Ibukota Samarinda.

20 Januari 1960, APTP selaku Gubernur Kalimantan Timur, atas nama Menteri Dalam Negeri melantik ketiga kepala Daerah Tingkat II, salah satunya adalah ARP sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai. Sehari kemudian, 21 Januari 1960 bertempat di Balai Rong Keraton Kesultanan Kutai Ing Martadipura di Tenggarong diadakan sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala Daerah Istimewa Kutai, SAMP kepada ARP sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai, dan mengangkat KS sebagai Walikota Samarinda serta ASM sebagai Walikota Balikpapan. Dengan serah terima pemerintahan tersebut, berarti pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dibawah kuasa SAMP berakhir¹. Kerajaan yang dibangun oleh ABADS mulai abad ke 13 ini telah tamat riwayatnya.

Keluarnya Izin Usaha Pertambangan Secara Masif

Samarinda terdiri atas 10 kecamatan, dan 53 kelurahan. Dalam pembahasan ini, penulis akan banyak mengambil sampel di Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, yang akan dikenalkan sebagai kawasan pasca tambang batu bara. Dari 63 IUP di Kota Samarinda, terdapat ± 8 IUP yang ada di Sempaja Utara. Daya rusak tambang batu bara yang paling mencolok di kawasan ini adalah telah mengalami peralihan fungsi dan *landscape* alam, dari lahan pertanian hijau nan subur menjadi kawasan padat pemukiman, yang di dalamnya juga bersarang lubang-lubang tambang yang belum direklamasi. Di kawasan ini, dampak krisis sosial ekologisnya telah melekat begitu dekat dan intim dengan masyarakat. Sehingga kehadirannya dirasa begitu familiar

Berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur tercatat 1192 IUP di Kalimantan Timur pada 2014, diantaranya 765 dalam tahap eksplorasi dan 427 tahap produksi. Samarinda termasuk di dalamnya, yang menyumbang 71% lahannya untuk industri pertambangan batu bara, yaitu ada 5 IUP dalam bentuk PKP2B yang sepenuhnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, 1 IUP Pemerintah Propinsi, dan 63 IUP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda saat AAS bersama wakilnya SJ memegang tampuk

¹ <http://www.kerajaanusantara.com/id/kutai-kartanegara/pemerintahan>

kekuasaan sebagai Walikota Samarinda selama dua periode (2000-2010). Dengan luasan masing-masing 33,48% PKP2B, 3,25% IUP Propinsi, 38,37% IUP Kota. Angka yang begitu mengejutkan, sebab sebagian besar wilayah Samarinda hanya menjadi lahan untuk industri tambang batu bara, yang akan berdampak pada lingkungan dan dirasakan oleh penghuni Samarinda sebanyak 805.688 ribu jiwa².

Angka presentasi yang dramatis itu bermula ketika diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan otonomi yang luas dan sistem desentralisasi yang dimiliki, ada beberapa urusan pemerintahan di bidang pertambangan umum yakni terbitnya PP No. 75 Tahun 2001, di mana bupati/walikota berwenang menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan (IKP)³. Inilah awal pesta tambang batu bara dimulai, dengan mengatasnamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan desentralisasi dengan memaksimalkan potensi daerah, maka IUP dikontrol dan dipegang oleh pemegang tampuk kekuasaan. Berkaitan dengan IUP, data hasil penelitian yang dilakukan Jatam Kaltim, luasan pertambangan akibat IUP baru di Samarinda bertambah signifikan saat digelarnya pemilu kepala daerah hingga legislatif sejak tahun 2000 lalu dan seterusnya. *"Itu menyangkut cost biaya politik yang harus dikeluarkan dan harus segera mendapatkan gantinya. Untuk itu, IUP seperti diobral"* tutur MJ, Kordinator JATAM Kaltim⁴.

Beberapa perusahaan tambang yang kerap kali bermasalah seperti PT. Graha Benua Etam, CV. Panca Bara Sejahtera memiliki konsesi di Sempaja Utara. Keduanya telah memberikan dampak yang sangat merugikan bagi warga, salah satunya adalah dengan meninggalkannya MR pada 22 Desember 2014 di lubang bekas tambang PT GBE, dan KY pada 3 Mei 2016 di danau yang terbentuk karena aktivitas pertambangan CV. Panca Bara Sejahtera.

Rata-rata, perusahaan yang ada di Sempaja Utara maupun Samarinda secara luas adalah perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan teknik pertambangan seperti yang dimuat dalam keputusan menteri ESDM nomor 55/K/26/MPE/1995, dengan tidak memasang plang atau tanda peringatan di tepi lubang dan tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang lain masuk ke dalam tambang. Selain itu, jarak antara lubang tambang dan pemukiman sangat dekat, bahkan ada yang hanya berjarak 50m seperti yang terjadi di Gang Saliki, tempat PT BGE beroperasi. Perusahaan bahkan tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, bahwa terhitung 30 hari kalender sejak perusahaan tidak beroperasi, lubang-lubang tambang yang ada harus segera direklamasi. Sehingga tidak heran jika terdapat 232 lubang bersarang dan tersebar (menurut data Jatam Kaltim).

Selain pelanggaran di atas, beberapa perusahaan diduga melakukan indikasi korupsi Salah satu yang tercatat di laporan investigasi (Indonesia Corruption Watch – Walhi Sumsel – Jatam Kaltim – Gemawan Kalbar) merekam jejak korupsi perusahaan batu bara PT Graha Etam Mandiri dan CV. Bumi Indah Permai, yang diduga telah memberikan dana suap untuk mempermudah mendapatkan izin usaha pertambangan sebesar 4 milyar rupiah dalam bentuk cek

² Hasil sensus jumlah penduduk Samarinda 2013. Lihat; <http://samarindakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/2>

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

⁴ <http://news.detik.com/berita/1846208/samarinda-dikepung-tambang-batu-bara-wali-kota-akan-digugat>

transferan pada 2006 kepada Kepala Distamben Kota Samarinda, RAR oleh RT, yang mewakili dua nama perusahaan, yaitu PT Graha Benua Etam sebesar 3 milyar, dan CV. Bumi Indah Permai sebesar 1 milyar.

Luas konsesi PT Graha Etam Mandiri adalah 493,70 Ha, terletak di Kelurahan Sempaja Utara. Sementara CV. Bumi Indah Permai (BIP) tidak terdapat dalam daftar perusahaan pemegang IUP oleh Distamben Kota Samarinda. Namun, nama BIP pernah saya dengar terlontar dari mulut PS, salah satu petani sayur yang rumahnya berada di Jl. Padat Karya, Gang Sayur, Sempaja Utara. Beliau saat itu bercerita tentang salah satu perusahaan yang pernah masuk di kawasan Sempaja Utara.

Hubungan Kepemilikan Lahan dan Tambang Batubara

Di Sempaja Utara, Sejak 15 tahun terakhir tambang mulai menggerogoti kawasan ini sejak banyaknya IUP yang dikeluarkan pemerintah kota. Berbarengan dengan itu, kedatangan warga pendatang yang bermigrasi dari beragam daerah di Indonesia terus meningkat. Sehingga, mau tak mau mereka harus menetap dan tinggal dengan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat.

Hadirnya model penjualan tanah-tanah kaveling, bermula dari membludaknya warga pendatang dan pembangunan proyek perumahan. Sehingga, tanah di Sempaja Utara adalah salah satu komoditas yang masif diperjualbelikan. Suku dominan yang mendiami wilayah ini adalah suku Jawa dan Bugis, sementara suku yang notabenenya adalah penghuni lama dipegang oleh Kutai dan Banjar.

Kepemilikan tanah pertama kali digarap oleh orang Kutai dan Banjar. Hal itu terlihat dari sejarah penguasaan lahan. Ada banyak tanah yang mereka kuasai sebagai hasil warisan dari orang tua mereka yang membuka lahan pertama di Sempaja pada Tahun 1904. Penggarapan tanah dilakukan oleh warga Kutai dan Banjar tidak terlepas dari pertalian sejarah kekuasaan antara Samarinda dengan Kerajaan Kutai Ing Martadipura. Saya sempat bertemu salah satu kakek berdarah Kutai, bernama Boy, yang merupakan keturunan dari ABM orang yang pertama kali diberikan kuasa menggarap lahan di Bengkuring, yaitu salah satu nama kampung di Sempaja.

Kala itu, Sempaja adalah lahan pertanian dan perkebunan yang sengaja diberikan oleh Kesultanan Kutai untuk digarap agar saat upacara Erau, mereka memberikan persembahan berupa hasil panen. Erau dilaksanakan sekali setahun, di Tenggarong.

Sebelum model penjualan tanah kaveling marak di Sempaja, pembelian tanah pertama kali di inisiasi oleh salah satu perusahaan jasa penimbunan, PT Pandurata milik anak mantan Gubernur SWD yang membeli lahan seluas 65 Ha kepada para pewaris lahan, yaitu Boy dan saudaranya pada tahun 1989. Waktu itu pula, PT Pandurata melakukan pelebaran jalan seluas 20 m. Disusul HS yang kemudian membeli tanah dari PT Pandurata seluas 65 Ha, ditambah 10 Ha dari keluarga Boy hingga tahun 2000. Saya melihat, ada hubungan erat antara pembelian tanah yang dilakukan oleh HS, dengan masuknya tambang batu bara seperti PT Graha Benua Etam, sebab kawasan tambang yang berada di Sempaja Utara, khususnya di Gang Saliki kebanyakan beroperasi di atas lahan HS. Hal itu juga terjadi di Makroman, berdasarkan jurnal yang ditulis

oleh SM bahwa di Kelurahan Makroman tanah HS terakumulasi di wilayah RT 13 yang kini menjadi kawasan tambang CV Arjuna⁵.

Namun, kini wilayah Sempaja telah masuk dalam kawasan Samarinda yang 71% lahannya digunakan untuk konsesi pertambangan batu bara. Tambang yang merenggut ruang hidup masyarakat, baik alamnya maupun sendi-sendi kehidupannya. Pendekatan yang digunakan untuk melihat krisis perempuan lebih dekat adalah dengan mendengarkan tutur perempuan. Bagaimana perempuan bertahan ketika alam tak lagi seramah dulu melayani kebutuhan manusia, bahkan ada yang sampai kehilangan anak. Dialah IR, yang secara konsepsi atau teori tidak paham persoalan hukum, namun secara mati-matian dengan tekad dan niat yang tulus memperjuangkan keadilan untuk kasus kematian anaknya.

Matinya Peran Komunal Sungai

Jauh sebelum tambang PT GBE masuk, masyarakat di Gang Sayur, dan Gang Saliki, Sempaja Utara berladang menggunakan sumber air dari rawa yang terbentuk dari hasil endapan air hujan dan aliran dari sungai Karang Mumus. Sementara di area perbukitan ditanami buah dan sayuran. Sumber makanan lain juga didapatkan masyarakat melalui perburuan hewan di hutan dan menangkap ikan dari sungai menggunakan pancing, jaring, atau bubu.

Sebagian besar warga di Sempaja pernah terlibat dalam rantai boom kayu atau dikenal dengan istilah “Banjir Kap” pada 1970an. Warga-warga kampung yang ada di Sempaja seperti Bengkuring, Pinang Seribu, Bayur, Muang, dan Lempake berbondong-bondong mencari kayu di hutan. Kayu-kayu itu, dihanyutkan melalui Sungai Karang Mumus. Sebagian besar yang ikut adalah laki-laki. Ada yang bahkan mencari kayu sampai ke Tanah Hulu dan selama berbulan-bulan masuk ke hutan. Mereka meninggalkan anak dan istri. Sementara perempuan, tetap di kampung mengurus rumah dan lahan pertanian sementara waktu untuk tetap melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga kala suami mereka sedang pergi. Kala itu masyarakat bahkan masih menggunakan sungai sebagai tempat untuk mandi, mencuci, bahkan dikonsumsi. Meskipun di beberapa tempat, hingga sekarang sungai masih difungsikan bagi rumah-rumah yang berada di bantaran sungai. Namun kondisinya memang memprihatinkan. Selain banyaknya sampah, juga kandungan air sungai tidak memungkinkan lagi untuk dikonsumsi, sebab bau lumpur dan warnanya kehitam-hitaman.

Sungai yang dahulu berfungsi sebagai sumber kehidupan sekaligus digunakan sebagai transportasi utama, kini perannya mati karena mengalami kehancuran akibat dari aktivitas pertambangan yang menyumbang sedimentasi dan pendangkalan, serta mengalir limbah beracun dari di sungai yang menyebabkan banyak ikan yang mati. Peristiwa itu dirasakan AL, yang setiap hari mencari ikan dengan memasang Bubu di Bendungan Benanga, Kelurahan Lempake. Bendungan tersebut merupakan salah satu aliran Sungai Karang Mumus, anak Sungai Mahakam. Bendungan Benanga rencananya dibangun untuk mengairi 350 Ha sawah, juga bertugas

⁵SM, “Mencari Makroman di Tanah Pinjaman; Perempuan Makroman di Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara”. Jurnal, No 10. Hal. 26, 2014

mengirimkan air bersih kepada warga kota dengan kapasitas 215 liter per detik⁶. Pintu kanan bendungan difungsikan untuk irigasi sawah ke Desa Giri Rejo yang letaknya sebelum Desa Benanga.

Beliau saat saya temui baru saja mengangkat perangkap ikannya yang dipasang 2 hari lalu. Hanya terdapat sekitar 5 ikan yang berhasil ditangkap. Padahal dahulu pada masa-masa kejayaan, menangkap ikan bisa sampai 50-100 ekor per bubu sebelum jemari pertambangan mengepung hulu sungai. Bayangkan saja, di hulu Sungai Karang Mumus, sebelah utara dan timur Benanga, sejumlah izin pertambangan batu bara terbit yang menurut data Jatim Kaltim, setidaknya terdapat sekitar 12 areal tambang, dengan 25 ijin konsesi pertambangan.

Sungai Mahakam memiliki 147 jenis spesies yang terdeteksi, dan dimanfaatkan oleh nelayan terutama masyarakat yang berada di bantaran sungai untuk mencari ikan. Namun, sekarang ikan mulai sulit di dapatkan karena limbah minyak dari kapal-kapal pengangkut batu bara itu dibuang di sungai. Setiap hari kapal ponton pengangkut batu bara yang melintasi sungai Mahakam, bisa berjumlah ± 100 kapal. Saya pernah iseng, duduk di pinggir tepian saat matahari sedang terik. Tidak cukup 10 menit, sudah 4 kapal ponton pengangkut batu bara melintas di hadapan saya. Tepat di depan Kantor Gubernur yang bertuliskan Kaltim Green.

Perubahan *Landscape* dan Alih Fungsi Lahan

Apakah kalian pernah lihat, bagaimana lahan pertanian yang hijau nan subur dalam beberapa tahun, berubah menjadi lubang tambang dan lahan yang menjadi porak-poranda karena galian ada di mana-mana? Jika belum, Sempaja Utara adalah salah satu potret kawasan yang bisa menggambarkan kondisi tersebut. Jika dulu 90% kawasan di Sempaja Utara adalah lahan pertanian, maka yang tersisa hanyalah sekitar 30%, lebih banyak berisi lahan tidur dan tanah-tanah kaveling yang menjadi sasaran penjualan, pemukiman, dan perumahan. Sementara hampir 70% masyarakat yang dahulunya bertani, beralih pekerjaan. Laki-laki menjadi buruh kasar, buruh bangunan, supir, sementara perempuan beralih menjadi pembantu rumah tangga, berdagang, dan tak sedikit yang *ngojek*.

Perempuan selain menjadi Ibu Rumah Tangga, juga mengalami beban kerja ganda mencari penghasilan tambahan. Sehingga, sering dijumpai satu orang perempuan bahkan memiliki sampai 3 jenis pekerjaan dalam sehari. Jika dulu, alam dengan mudahnya menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik dari makanan, minuman, dan obat-obatan. Tetapi, kini layanan alam itu diperoleh sangat mahal karena semuanya harus serba beli. Maka warga di Sempaja selain beralih pekerjaan, pola prosurnya juga berubah. Orang di Sempaja menjadikan kerja sebagai prioritas harian untuk mendapatkan uang, agar bisa membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang kebutuhan yang lain. Karena setiap orang meyibukan diri dengan aktivitas kerja, maka untuk berkumpul dengan tetangga dan orang

⁶ Data dikutip dari (<http://kaltim.prokal.co/read/news/262381-sungai-karang-mumus-babak-belur-di-hulu-dan-hilir-masalah-sosial-harus-selesai/1>)

lain di lingkungan sekitar menjadi jarang dilakukan. Yang lebih mengerikan adalah, pola pikir masyarakat mulai di cekoki oleh logika berpikir untung rugi, “uang” dll.

Karena kawasan ini letaknya di pinggir kota dan masuk dalam daerah urban, maka orang bisa dengan bebas keluar masuk bermigrasi, mencari tempat bermukim dan bekerja. Sehingga keterikatan mereka dengan tanah, seolah hanya sebagai tempat singgah. Di sempaja, tanah menjadi salah satu komoditas yang sangat gencar di perjual belikan, sehingga pembangunan sedikit demi sedikit mulai memasuki wilayah tersebut.

Saya menyebut ini sebagai krisis sosial, karena relasi antar individu tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Bahkan, tetangga ada yang tidak saling mengenal, semisal PMt, RT 21 di Jl. Padat Karya, yang sama sekali tidak mengenal IR saat beberapa waktu lalu berkesempatan mendatangi rumah Pak RT, yang jaraknya hanya sekitar 50 m dari rumahnya. Kebetulan, saat itu beliau dan istrinya baru saja pulang kerja malam hari. Pekerjaan di luar rumah membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan tetangga.

Hubungan Ormas dengan Tambang

Di Sempaja Utara, area-area konsesi pertambangan selalu melibatkan ormas untuk melakukan pengamanan, agar umur pertambangan di tempat itu sebisa mungkin berjalan dengan mulus. Itu yang diakui oleh petani sayur yang di sekitar kebun sayurnya terdapat 2 lubang bekas tambang yang belum direklamasi. Beliau mendirikan rumah bersampingan dengan kebun sayurnya. Namanya PS dan Istrinya KSM, yang tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Sayur, RT 09. Meskipun masyarakat beberapa kali keberatan oleh kehadiran perusahaan tambang karena dirasa merugikan, sebagian hanya bisa pasrah, *“Dari pada ribut-ribut, lebih baik kerja saja urus urusan sendiri, yang penting mereka tidak mengganggu”* tutur KSM.

Kepasrahan yang tergambar dari ungkapan KSM adalah bentuk ketakutan mereka setelah mendengar nama Pemuda Pancasila yang diketuai SA, yang dikenal menjadi backingan PT Graha Benua Etam di wilayah itu. Kebanyakan masyarakat bahkan tak acuh dan memalingkan muka melihat tanah di kawasan mereka dikeruk dan dirusak tanpa ampun, hanya demi menjaga agar tidak berurusan dengan SA dan kroninya. Mereka segan dan takut seperti ungkapan pasrah PS *“Polisi aja takut ama si SA itu”*.

PS yang merupakan petani sayur dengan luasan tanah yang hanya sepetak berukuran 20 x 15 m, sangat merasakan perbedaan sebelum dan sesudah masuknya tambang. Keadaan tanah menurutnya kritis, apalagi jika musim hujan datang. Banjir mengairi lahan perkebunan mereka. Ketika ditanyai pendapatnya tentang lubang tambang, PS berharap lubang tambang itu ditutup. *“Sebelum ada tambang, masyarakat bisa berkebun dan ketersediaan air mencukupi”* tuturnya. Bahkan PS sempat mendirikan kelompok tani bersama masyarakat. Mereka menyebutnya *“Kelompok Indah”* yang diketuai oleh Alm.HB. Kelompok tani ini berdiri sebelum tambang masuk, dan sempat berjalan kurang lebih 5 tahun. Namun terkendala pada persoalan pengelolaan keuangan yang kurang baik.

Krisis Sosial Ekolois Berbasis Gender

Krisis sosial ekologis di kawasan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Masyarakat mengetahui penanda krisis itu, namun tidak menyadarinya sebagai ancaman atau bahaya. Padahal mereka tinggal berdampingan dengan situs-situs krisis seperti lubang tambang yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk mandi, mencuci, dan memasak. Saya akan melihat lebih banyak tutur perempuan, karena secara ketubuhan mereka yang paling banyak berinteraksi dengan lingkungan mereka tinggal, sehingga pengalaman-pengalaman perempuan menjadi cerminan dari perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah tambang masuk.

Sumber Air yang (di)hilang(kan)

Sebagian besar, masyarakat yang hidup di kawasan yang berdampingan dengan lubang bekas tambang, mengalami gangguan di sumber-sumber airnya. Gangguan itu dapat berupa berubahnya struktur air dari mulai warna dan bau, serta ada yang sampai mengalami kekeringan. KH menuturkan “*Dulu di sini sebelum ada tambang, airnya bersih, baik-baik aja. Tapi setelah tambangnya masuk, airnya warna merah. Sumur saya juga bersamaan kering*”. Kekeringan air di sumur-sumur warga di Gang Saliki, RT 67 (sekarang RT 09), terjadi secara bersamaan saat tambang masuk menggali batu bara hingga terbentuk lubang berisi air.

Di tengah kondisi yang terhimpit untuk urusan air, kadang-kadang masyarakat terutama perempuan menampung air hujan menggunakan drum atau ember yang akan dikonsumsi dalam beberapa hari saat musim hujan. Selain itu, mereka harus membeli air yang dijual dari mobil-mobil pengangkut tandon seharga 70 ribu ukuran 12 Liter apabila sumurnya masih kekeringan.

Sebagian masyarakat memilih memasang PDAM seperti Ibu Prapti yang tinggal di Gang Saliki RT 09. Lokasi rumahnya berjarak sekitar 100 m dari lubang bekas tambang. Ia mengaku terpaksa menggunakan PDAM karena sumur sudah tidak bisa diharapkan memenuhi kebutuhan air bersih di rumahnya. Untuk memasang PDAM, cukup merogoh kantong, sebab bisa menghabiskan 2 juta, hingga 2,5 juta. Belum lagi, tagihan air yang harus dibayar setiap bulan.

Sebelum tambang masuk, PI dan KH menggunakan air dari sumur galian. Namun setelah tambang masuk berbarengan dengan sumur mereka mengalami kekeringan, mereka sempat menggunakan air dari lubang bekas tambang. Namun, setelah aktivitas pertambangan terhenti, dan lubang bekas tambang ditutup setelah menelan korban, warga kemudian beralih membeli air, dan ada yang menggunakan PDAM.

Lubang Tambang Berbahaya

Air dari lubang bekas tambang yang notabeneanya memiliki beberapa senyawa berbahaya sangat rentan mendatangkan penyakit apabila digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan, Dinas Kesehatan Samarinda pernah membagikan selebaran yang berisi himbauan untuk tidak mamakai kembali air bekas lubang tambang karena dapat menyebabkan iritasi pada mata dan vagina serta jika dipakai mencuci dapat menyebabkan flek-flek pada pakaian.

IW, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat, merasa bahwa mereka tidak punya pilihan karena mengalami kekeringan air, akhirnya menggunakan air dari lubang bekas tambang untuk aktivitas mandi, mencuci. Sedangkan untuk minum, menggunakan air galon. Menurutnya,

air bekas tambang sebenarnya tidak nyaman dipakai untuk mandi, sebab lengket dan kulit terasa keras. Bahkan jika malam, kadang beliau merasa gatal dan tidak nyaman. Bagi masyarakat yang menggunakan air dari lubang bekas tambang, mereka harus mencampur obat sebelum digunakan.

Perempuan, Intimidasi dan Resistensi dari luar

Lubang tambang, selain menjadi penanda krisis karena airnya berbahaya untuk dikonsumsi, juga pada 22 Desember 2014 lalu di Sempaja Utara, seorang bocah bernama MR tenggelam saat bermain bersama teman-temannya. Ada 3 kawasan di Kalimantan Timur seperti di Samarinda, Paser, dan Kutai Kertanegara mengalami kasus serupa.

Hingga kini ada 24 kasus anak tenggelam di lubang bekas tambang. IR, Ibu korban pernah mendapat intimidasi dan beberapa kali orang suruhan perusahaan datang menawarkannya sejumlah uang agar kasus kematian putranya tidak diperkarakan. Bahkan, sampai melibatkan sahabat dekat dan keluarga IR untuk membantu agar beliau mau menerima uang dari perusahaan. Bahkan, saat negosiasi di rumahnya bersama orang suruhan perusahaan membicarakan uang tersebut, ia sempat diancam kuburan anaknya akan dibongkar jika beliau tetap keras kepala menolak menyelesaikan kasus kematian anaknya melalui cara “kekeluargaan”.

Perempuan Tak Punya Hak Suara

Meskipun perempuan di Sempaja memiliki hak waris terhadap tanah, namun akses dan kontrol, tetap berada di tangan laki-laki sebagai pemegang keputusan. Saat masuknya perusahaan PT Graha Benua Etam di RT 68, masyarakat hanya dilibatkan dalam acara pertemuan tanpa melibatkan perempuan. Pertemuan itu dianggap sebagai sosialisasi oleh pihak yang berkepentingan membuat AMDAL agar seolah-olah tata cara pembuatan AMDAL sudah berjalan seperti seharusnya.

Padaحال pertemuan tersebut diakui oleh mantan kepala RT, PSo yang tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Saliki RT 09 isinya hanya acara makan-makan. PSo Sudah 11 tahun menjadi ketua RT. Masa jabatan RT nya berakhir pada bulan Maret lalu. Beliau menyatakan mengetahui adanya pertambangan masuk di lingkungannya sejak 2005. Menurut pengakuannya, perusahaan hanya datang sekali mengundang untuk acara syukuran yang diadakan oleh perusahaan. Tidak semua masyarakat di undang dalam acara tersebut. Hanya tokoh masyarakat saja yang ikut terlibat, dan bahkan tidak melibatkan perempuan. Perempuan bahkan sama sekali tidak memiliki hak suara untuk mengeluarkan pendapat, seolah perempuan tidak memiliki lahan.

Perusahaan datang, lebih dulu membawa alat-alat berat ke lokasi, lalu baru ada undangan untuk acara syukuran. Dalam acara tersebut, ketua RT merasa tidak di mintai persetujuan atau pun saran apalagi terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam pernyataannya, pak RT tidak dapat menolak adanya pertambangan saat itu karena pihak perusahaan menunjukkan surat-surat izin beroperasi yang sudah di tandatangani oleh Walikota. Padahal beliau merasa tidak pernah menandatangani surat apapun.

Banjir Menjadi Bulan-bulanan Warga

“Bukan Samarinda namanya kalau tidak banjir” ungkapan yang terlontar dari IR saat mendapati tangga rumahnya beberapa inci lagi akan dimasuki air saat hujan menerpa kawasan Sempaja ± 3 jam. Sudah beberapa kali rumahnya menjadi bulan-bulanan banjir sebelum rumahnya di dongkrak lebih tinggi dari yang sekarang. Itu juga yang mengharuskannya mengeluarkan uang sebesar 32 juta untuk biaya mendongkrak rumah itu. Saat banjir, Ibu 4 anak ini harus bekerja lebih keras dari suami untuk membersihkan rumah dari lumpur dan barang-barang berharga. Dalam pandangan patriarki, urusan domestik memang menjadi tugas bagi perempuan. Laki-laki hanya membantu seadanya, pada hal-hal tertentu semisal membantu mengangkat barang-barang yang berat.

Banjir yang kerap terjadi di Samarinda ketika hujan turun lebih dari 2 jam, disebabkan karena semakin kurangnya daerah resapan air hujan. Itu terjadi karena semakin menjamurnya area pemukiman, dan wilayah konsesi tambang yang tak kalah luasnya.

Perumahan Solong Durian, Sempaja Utara salah satunya. Potret kawasan banjir dari aktivitas tambang batu bara. Perumahan Solong Durian, masuk dalam konsesi PT GBE, di sana saya bertemu dengan PNY dan MI yang merupakan ketua RT 25. Menurut pengakuan beliau, perumahan Solong Durian tidak pernah mengalami masalah, tepat setelah tambang masuk, masyarakat menjadi bulan-bulanan banjir dan jalan di perumahan banyak yang rusak dan berlubang. *“Pas tambang masuk, banjir juga datang mbak. Itu di rumah yang tanahnya rendah itu, sering banjir lumpur”* tutur MI sambil menunjuk arah penurunan jalan di lorong rumahnya. Kebetulan rumah MI terletak di tanah yang agak tinggi, sehingga jika hujan turun, beliau harus menyaksikan tetangganya yang berada di bawah kemiringan jalan menjadi bangunan yang diserbu lumpur dan air.

Kesimpulan

Wajah krisis yang tergambar di Kelurahan Sempaja Utara adalah dampak dari rezim ekstraksi yang memposisikan manusia sebagai aspek yang diabaikan dari segi keselamatan dan kenyamanan. Selain manusia, alam adalah objek vital yang dalam praktek-praktek pertambangan menjadi sumber daya yang dieksploitasi tanpa ampun. Dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah, menggambarkan minimnya keprihatinan mereka terhadap kelangsungan hidup alam dan masyarakat. Mereka bahkan luput dari upaya pemulihan atas kebangkrutan ekologis yang terjadi di Samarinda. Hilangnya ruang-ruang hidup yang aman dan krisis ekologis yang terjadi, seolah mengingatkan kepada kita bahwa alam memang sepatutnya dijaga sebagai tempat kita berpijak dan hidup. Saat tanah dan air mulai kehilangan keramahannya, perempuan yang paling rentan terhadap perubahan itu. Mereka tidak memiliki pilihan selain bertahan dengan kondisi air yang buruk, karena kandungan berbahaya yang terdapat pada lubang bekas tambang, sementara tidak semua keluarga mampu membuat sumur bor atau memasang PDAM. Mereka juga selain harus mengatur siasat untuk bertahan di tengah kondisi krisis yang sebenarnya mengancam keselamatan mereka, perempuan juga terlibat dalam ketidakadilan gender ketika ruang-ruang keluarga berubah menjadi penjara kerja bagi mereka untuk membantu suaminya mendapatkan penghasilan tambahan, sementara mereka masih saja harus berada pada lapisan

terbawah yang suara-suaranya tidak pernah di dengar sebagai hal yang patut untuk dipertimbangkan sebagai subjek pengambil keputusan.

Daftar Pustaka

- Hasil sensus jumlah penduduk Samarinda 2013. Lihat;
<http://samarindakota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/2>
<http://kaltim.prokal.co/read/news/262381-sungai-karang-mumus-babak-belur-di-hulu-dan-hilir-masalah-sosial-harus-selesai/1>
<http://news.detik.com/berita/1846208/samarinda-dikepung-tambang-batu-bara-wali-kota-akan-digugat>
<http://www.kerajaannusantara.com/id/kutai-kartanegara/pemerintahan>
- Maemunah, Siti. 2014. *Mencari Makroman di Tanah Pinjaman; Perempuan Makroman di Tengah Perubahan Agraria dan Perjuangan Komunitas Menghadapi Pengerukan Batubara*. Jurnal, No 10. Hal. 26,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan
Tempo, 17 November 2015